



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BERNADETTE YULIASARI MULYATNO**
2. Jabatan : **KEPALA KANTOR WILAYAH**
3. NHK : **765555**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	5.705.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000		
3. Bangunan Seluas 20 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 66 m2/63 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/165 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 3.225.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	451.000.000
1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR MATIC Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000		
2. MOBIL, HONDA ALL NEW BRV PRESTIGE SENSING Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000		
3. MOBIL, SUZUKI BALENO MC AT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	221.025.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	312.354.812



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.689.379.812
III. HUTANG	Rp.	3.994.038.280
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.695.341.532

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PRIMA INDRI YANA
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM
3. NHK : 783478

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.342.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 189 m2/127 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 742.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	5.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO ACB2J22B03 A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	3.000.000
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	21.181.543
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.371.181.543
III. HUTANG	Rp.	123.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.248.181.543

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ACHMAKRISHNA HIMAWAN**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA**
3. NHK : **73672**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.380.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m2/68 m2 di KAB / KOTA PATI, HASIL SENDIRI , Rp. 580.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	212.500.000
1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA VIXION Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
4. MOBIL, SUZUKI BALENO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	160.140.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	13.216.300
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.765.856.300
III. HUTANG	Rp.	110.958.770
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.654.897.530



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AHID IWANUDIN**
2. Jabatan : **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG**
3. NHK : **765660**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.712.474.635**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 121 m²/90 m² di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 655.157.869
2. Tanah Seluas 1.219 m² di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, Rp. 325.433.000
3. Tanah Seluas 1.110 m² di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 300.558.000
4. Tanah Seluas 948 m² di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 350.882.000
5. Tanah Seluas 457 m² di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 83.814.078
6. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m²/90 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 996.629.688

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **455.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AGYA MATIC 2014 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 93.000.000



4. MOTOR, HONDA VARIO 160 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000
5. MOBIL, MERCEDEZ BENZ C 230 CLASIC MT Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 99.000.000
6. MOTOR, YAMAHA RX K 135 CC Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 37.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	323.734.986
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	135.929.602
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	3.627.139.223
III. HUTANG	Rp.	160.678.708
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.466.460.515

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PRIHATIN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENILAIAN
3. NHK : 974163

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.650.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 56 m2/56 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 57 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 59 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	219.800.000
1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.800.000		
3. MOBIL, SUZUKI XL 7 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	20.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	47.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.937.300.000



III. HUTANG

Rp. 1.100.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 837.300.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARNO FEBRIANTO
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA
3. NHK : 798519

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.460.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 21 m2/21 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/72 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	460.000.000
1. MOBIL, MITSUBISHI KUDA MINIBUS Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000		
2. MOTOR, HONDA GL 1500 MOTOR Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
3. MOBIL, NISSAN JUKE COMPACT SEDAN Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000		
4. MOBIL, NISSAN LIVINA MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	333.500.000
D. SURAT BERTAHAP	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	827.872.336
F. HARTA LAINNYA	Rp.	9.000.000
Sub Total	Rp.	3.090.372.336



III. HUTANG

Rp. 43.927.795

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.046.444.541

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HARDI SUMARYADI**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG KEPATUHAN INTERNAL, HUKUM, DAN INFORMASI**
3. NHK : **767091**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp. 630.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m ² /85 m ² di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 630.000.000	
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp. 107.000.000
1. MOBIL, NISSAN XTRAIL XT 2.5 Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000	
2. MOTOR, HONDA VARIO 110 CC Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000	
3. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000	
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp. 39.900.000
D. SURAT BERHARGA	Rp. ---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp. 2.300.000
F. HARTA LAINNYA	Rp. ---
Sub Total	Rp. 779.200.000
III. HUTANG	Rp. 93.500.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp. 685.700.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.